MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 285/DJMT/ST.KP7.1/IX/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 105/DJMT/KEP/OT1.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2024.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Marsekal Muda TNI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 198208022009041002, Penata Tingkat I (III/d), Hakim Yustisial;
3. Retno Ariyani, S.H., M.H./ 198403072008052002, Penata Tingkat I (III/d), Hakim Yustisial;
4. Dheo Agustian Saputra, S.H./ 119526, Sersan Kepala, Klerek - Pengolah Data dan Informasi.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 sd. 28 September 2024;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,



Yuwono Agung Nugroho
Marsekal Muda TNI